

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjie, Habib. 2018. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*. Mandar Maju, Bandung
- A.P. Parlindungan. 1996. *Komentor Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung
- Bachtiar, Effendi. 1993. *Kumpulan Tentang Hukum Tanah*. Alumni, Bandung
- Hadjon, M. Philippus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya; Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*. PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Harsono, Boedi. Jilid 2, 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok - Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Ibrahim, Jhonny. 2009. *Pendekatan ekonomi terhadap hukum*, Putra Media Nusantara & ITSPress, Surabaya
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar ilmu hukum*, Kencana, Jakarta
- Perangin, Effendi. 1991. *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*. Rajawali Pers, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dkk. 2015. *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum hak tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Dr. St. Laksanto Utomo, SH.,MH. 2011. *Aspek Hukum kartu Kredit dan Perlindungan konsumen*, Alumni, Bandung
- Sjahdeni, Sutan Remy. 1999. *Hak Tanggungan, Asas, ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*, Alumni, Bandung
- Waskito, Arnowo, Hadi. 2015. *Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan)*. Media Adji. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 268 Tahun 1982 Tentang Kebijakan Pokok-pokok Penertiban/Pemanfaatan Tanah Yang Dicadangkan Bagi Dan Atau Dikuasai oleh Perusahaan-perusahaan;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Penertiban Tanah di Daerah Perkotaan yang Dikuasai oleh Badan Hukum/Perseorangan Yang Tidak Dimanfaatkan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Terlantar;

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998.